

Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

SKPD : Sekretariat DPRD
TAHUN ANGGARAN : 2026

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan / (Indikator/Tujuan)	Data Pembuka Wawasan	Isu Gender			Kebijakan dan Rencana ke Depan		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Baseline)	Indikator Kinerja
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI KEGIATAN : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah SUB KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi TUJUAN : Meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesionalisme, dan kualitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi dengan memperhatikan kesetaraan akses bagi ASN laki-laki dan perempuan guna mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur.	Berdasarkan data kepegawaian Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, jumlah ASN sebanyak 217 orang yang terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 127 orang atau sebesar 58,53% dan ASN perempuan sebanyak 90 orang atau sebesar 41,47%. ASN laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama penting dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja organisasi, ASN laki-laki maupun perempuan memerlukan kesempatan yang setara untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi jabatan guna meningkatkan kompetensi, keterampilan, profesionalisme, dan kualitas sumber daya aparatur. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Kalimantan Timur telah didukung melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 61 Tahun 2012 tentang Penerapan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan Daerah serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan daerah. Masih diperlukan peningkatan kapasitas ASN laki-laki dan perempuan melalui pendidikan dan pelatihan yang responsif gender guna mendukung peningkatan kompetensi aparatur, kualitas pelayanan publik, serta implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan Gubernur Kaltim No. 463/K.532/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan PPRG pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Akses : Belum seluruh ASN laki-laki dan perempuan dalam kegiatan kesempatan yang optimal dan setara dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi karena keterbatasan kuota peserta, anggaran, dan penyesuaian kebutuhan organisasi. Partisipasi : Partisipasi ASN laki-laki dan perempuan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan masih dipengaruhi oleh pembagian tugas, beban kerja, dan penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan kedinasan. Kontrol : Kesempatan ASN dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan masih bergantung pada kebutuhan organisasi, penugasan pimpinan, serta prioritas pengembangan kompetensi perangkat daerah. Manfaat : Manfaat peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan belum sepenuhnya dirasakan secara optimal dan merata oleh ASN laki-laki maupun perempuan dalam mendukung pengembangan karier dan peningkatan kualitas kinerja aparatur.	Belum optimalnya perencanaan pengembangan kompetensi ASN yang mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pemberian kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi. Belum optimalnya identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN berdasarkan kondisi dan kebutuhan pengembangan kompetensi ASN laki-laki maupun perempuan. Masih terbatasnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan pelatihan yang responsif gender dalam mendukung implementasi PUG dan PPRG di lingkungan perangkat daerah.	Keterbatasan kuota peserta pendidikan dan pelatihan menyebabkan belum seluruh ASN laki-laki dan perempuan dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara optimal. Perbedaan beban kerja dan tugas kedinasan ASN laki-laki maupun perempuan mempengaruhi kesempatan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jadwal pelaksanaan kegiatan. Perkembangan regulasi dan dinamika kebutuhan organisasi menuntut ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Tuntutan implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) mendorong perlunya peningkatan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang responsif gender.	Meningkatkan kapasitas dan kompetensi ASN laki-laki maupun perempuan melalui pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi secara adil dan setara. Mewujudkan pengembangan sumber daya aparatur yang profesional, berkualitas, kompeten, dan responsif gender dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah. Meningkatkan kesempatan ASN laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses terhadap pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan pengembangan kompetensi. Mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui pengembangan kompetensi aparatur yang responsif gender.	Mengintegrasikan perspektif Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kinerja perangkat daerah. Mendorong peningkatan pemahaman ASN terhadap pelaksanaan PUG dan PPRG melalui pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang berkelanjutan. Masukkan : Rp. 273.243.000 Keluaran : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Hasil : Pensektoran SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Kepegawaian Perangkat Daerah	Berdasarkan data ASN Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026, jumlah ASN sebanyak 217 orang yang terdiri dari ASN laki-laki sebanyak 127 orang atau sebesar 58,53% dan ASN perempuan sebanyak 90 orang atau sebesar 41,47%. Data ASN berdasarkan jenis kelamin menunjukkan perlunya pemberian kesempatan yang setara bagi ASN laki-laki dan perempuan dalam mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi guna mendukung peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Masih diperlukan peningkatan kompetensi ASN laki-laki maupun perempuan melalui kegiatan kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, serta pendidikan dan pelatihan yang responsif gender. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai yang responsif gender diharapkan mampu mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Keputusan Gubernur Kaltim No. 463/K.532/2018 Tentang Juknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan PPRG pada Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur	Output : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Jumlah Orang yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 75 Persen ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim sudah memahami implementasi dari PUG dan PPRG) Outcome : Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (Meningkatnya jumlah ASN di lingkungan Sekretariat DPRD yang memahami PPRG, meningkatnya jumlah dan kualitas kebijakan pengarusutamaan gender) Indikator Kinerja : 75 Persen ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim sudah memahami PPRG

Samarinda, 15 Juni 2026

Pil. Sekretaris DPRD

Hardiyanto, S.E.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 197101171990101001